



STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta



No : 616.1 /ST/STIPRAM/XII/2023
Perihal : **Penugasan Penyusunan Buku Ajar**

Yogyakarta, 5 Desember 2023

SURAT TUGAS

Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, menugaskan kepada:

No.	Nama Dosen Peneliti	NIDN	Unit Kerja
1	Dr. Primantoro Nur Vitrianto, S.Si., M.Sc.	0516088001	S-1 Pariwisata

Untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Buku Ajar berjudul **Pembangunan Berkelanjutan dalam Kajian Pariwisata** untuk Mata Kuliah *Sustainable Tourism* pada Program Studi S-1 Pariwisata.

Demikian surat tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua

Dr. Sutendroyono, S.H., M.M., M.Par., CHE., CGSP.
NUP. 9905545843

Primantoro N Vitrianto

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KAJIAN PARIWISATA



Primantoro Nur Vitrianto

**PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
DALAM
KAJIAN PARIWISATA**



PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KAJIAN PARIWISATA

©2024, Primantoro Nur Vitrianto

Cetakan Pertama, Maret 2024

ISBN: 978-623-8435-51-7

x + 190 halaman, 15,5 cm x 23 cm

Editor : Eko Sugiarto

Tata Letak Isi : Rasyid Hidayat

Desain Sampul : Ahmad Hanin Lathif

Diterbitkan oleh:

MATA KATA INSPIRASI

(Anggota IKAPI No. 146/DIY/2021)

Gampingan RT 003, Dusun Munggang,

Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: matakatainspirasi@gmail.com

www.matakatainspirasi.id

PRAKATA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Kepada para pembaca yang terhormat.

Pariwisata berkelanjutan telah menjadi sebuah kebutuhan mendesak dalam upaya kita untuk melindungi sumber daya alam, memperkuat budaya lokal, serta memastikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di destinasi pariwisata. Dalam sebuah era di mana perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kesenjangan sosial menjadi isu-isu kritis, penting bagi kita untuk mengadopsi pendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi para mahasiswa pariwisata untuk memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi, serta solusi-solusi yang inovatif dalam mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan. Melalui berbagai bab yang terstruktur secara sistematis, pembaca akan dihadapkan kepada berbagai topik, mulai dari konsep dasar pariwisata berkelanjutan, manajemen destinasi, hingga upaya-upaya penerapan praktik-praktik terbaik dalam berbagai konteks global dan lokal. Dengan kata lain, buku ini merupakan sebuah panduan yang komprehensif, dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, prinsip, dan praktik-praktik terbaik dalam pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga buku ajar ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi Anda semua dalam perjalanan menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan yang lebih baik.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu

[Penulis]

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Selamat datang dalam buku ajar yang membahas tentang pariwisata berkelanjutan. Pariwisata merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di seluruh dunia, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi global, dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi jutaan orang setiap tahun. Namun, dengan pertumbuhan yang cepat ini juga datang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan budaya.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep pariwisata berkelanjutan, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keberlanjutan dalam industri ini. Dengan melibatkan berbagai konsep, studi kasus, dan panduan praktis, kami berharap buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi berbagai kalangan yang tertarik dalam memahami dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan, khususnya mahasiswa pariwisata.

Pembahasan dalam buku ini meliputi hal-hal berikut:

1. Sejarah, definisi, dan konsep berkelanjutan;
2. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Pergeseran dari *milenium development goals* ke *sustainable development goals*, termasuk di dalamnya 17 prinsip SDGs;
4. Sasaran, prinsip, pendekatan pariwisata berkelanjutan, hingga pembangunan berkelanjutan di Indonesia;

5. Daya dukung lingkungan, di dalamnya mencakup dinamika, faktor pendorong, dan faktor penghambat;
6. Keterkaitan antarkonsep keberlanjutan pariwisata;
7. Kebocoran dalam pembangunan pariwisata; serta
8. Perubahan iklim.

Selain itu, buku ini juga memuat konsep (1) dampak pariwisata terhadap lingkungan, budaya, dan masyarakat lokal, serta strategi untuk mengurangi dampak-dampak negatifnya; (2) peran penting pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri pariwisata, masyarakat lokal, dan wisatawan dalam mempromosikan keberlanjutan; serta (3) tantangan dan peluang masa depan untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami kompleksitas pariwisata berkelanjutan dan memberikan inspirasi untuk bertindak dalam mendukung pengembangan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga informasi yang disajikan dapat memberikan kontribusi positif bagi industri pariwisata dan dunia kita yang berkelanjutan.

Selamat membaca!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu

[Penulis]

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB 1 SEJARAH KEBERLANJUTAN.....	1
A. Tujuan Pembelajaran.....	1
B. Sejarah Kemunculan Keberlanjutan.....	1
C. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan ..	3
D. Pembangunan Berkelanjutan: Memenuhi Kebutuhan Tanpa Mengorbankan Kemampuan Generasi Mendatang	9
E. Tanggung Jawab Kolektif dalam Mengelola Pariwisata Berkelanjutan: Peran Perusahaan, Destinasi, dan Wisatawan	13
F. <i>Sustainable</i> dalam Kajian Kebijakan dan Hukum.....	14
G. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Lingkungan Indonesia.....	17
H. Kesimpulan.....	21
I. Pertanyaan Latihan.....	22
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	23
A. Tujuan Pembelajaran.....	23
B. Sejarah Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan ...	23
C. Penerapan Keterpaduan Antarprinsip dalam Keberlanjutan	33
D. Kesimpulan.....	36
E. Pertanyaan Latihan.....	38

BAB 3 PERGESERAN MDGs to SDGs	39
A. Tujuan Pembelajaran	39
B. Dari MDGs Menuju ke SDGs	39
C. SDGs di Indonesia	42
D. Penjelasan 17 Tujuan SDGs	45
E. Kesimpulan	82
F. Pertanyaan Latihan	85
BAB 4 PARIWISATA BERKELANJUTAN	87
A. Tujuan Pembelajaran	87
B. Sasaran Pembangunan Berkelanjutan	87
C. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan	89
D. Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.....	96
E. Modal Dasar Keberlanjutan.....	99
F. <i>The 10 R's of Sustainability</i>	103
G. Keberlanjutan sebagai Energi.....	105
H. Pariwisata Berkelanjutan.....	106
I. Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.....	109
J. <i>Mass Tourism Vs Sustainable Tourism</i>	114
K. Kesimpulan	118
L. Pertanyaan Latihan	121
BAB 5 DAYA DUKUNG	123
A. Tujuan Pembelajaran	123
C. Dinamika Daya Dukung	128
D. Faktor Penentu Daya Dukung.....	130
E. Penghambat Daya Dukung Pariwisata.....	134
F. Kesimpulan	136
G. Pertanyaan Latihan	137

BAB 6 KETERKAITAN ANTARKONSEP KEBERLANJUTAN PARIWISATA.....	138
A. Tujuan Pembelajaran.....	138
B. Konsep Pariwisata Berkelanjutan	138
C. <i>Community Based Tourism</i>	147
D. <i>Pro Poor Tourism</i>	149
E. <i>Good Tourism Governance</i>	151
F. Pariwisata dan Kebijakan Politik	153
G. Pariwisata dan Ekonomi Hijau (<i>Green Economy and Tourism</i>)	155
H. <i>Global Code of Ethics for Tourism</i>	156
I. <i>Sustainable Design</i>	157
J. Kesimpulan.....	162
K. Pertanyaan Latihan.....	163
BAB 7 KEBOCORAN DALAM PARIWISATA	164
A. Tujuan Pembelajaran.....	164
B. Fenomena Kebocoran dalam Pariwisata.....	164
C. Bentuk-Bentuk kebocoran.....	166
D. Kebocoran Pariwisata dan Dampak Negatif Pariwisata .	167
E. Kesimpulan	170
F. Pertanyaan Latihan.....	171
BAB 8 OUR CLIMATE, OUR FUTURE	172
A. Tujuan Pembelajaran.....	172
B. <i>What is Climate Changes?</i>	172
C. Kaitan <i>Climate Changes</i> dengan Pariwisata.....	174
D. Evolusi Peradaban dan Teknologi Manusia.....	175
E. Penanda <i>Climate Changes</i> dalam Pariwisata	178
F. Kesimpulan	180
G. Pertanyaan Latihan.....	181
DAFTAR PUSTAKA.....	182

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keberlanjutan dan Pariwisata.....	3
Gambar 2. Perjalanan Alam Semesta.....	10
Gambar 3. Pariwisata sebagai Ancaman dan Pariwisata Berkelanjutan	11
Gambar 4. Dari MDGs menuju SDGs.....	39
Gambar 5. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	46
Gambar 6. Prinsip Pariwisata Berkelanjutan	92
Gambar 7. Pendekatan Keberlanjutan dalam Perspektif Pembangunan Pariwisata	96
Gambar 8. Keterkaitan antara Modal dengan Kesejahteraan dan Keberlanjutan	101
Gambar 9. The 10 R's of Sustainability.....	105
Gambar 10. Tiga Aspek Utama Pariwisata Berkelanjutan	111
Gambar 11. Lima Sasaeen Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	113
Gambar 12. Logistic Growth of Population Size Over Time	124
Gambar 13. Interaksi Antardampak dalam Perencanaan Pariwisata.....	134
Gambar 14. Keterkaitan Antarkonsep dalam Pariwisata Berkelanjutan	141
Gambar 15. Pariwisata Berkelanjutan dengan Berbagai Model Pendekatan.....	143
Gambar 16. Daya Dukung dan Pengelolaan.....	145

BAB 1

SEJARAH KEBERLANJUTAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengetahui dan memahami tentang sejarah kemunculan keberlanjutan;
2. Mengetahui dan memahami tentang peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan;
3. Mengetahui dan memahami tentang bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat memenuhi kebutuhan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang;
4. Mengetahui dan memahami tentang tanggung jawab kolektif dalam mengelola pariwisata berkelanjutan: peran perusahaan, destinasi, dan wisatawan; serta
5. Mengetahui dan memahami tentang berkelanjutan dalam kajian kebijakan dan hukum.

B. Sejarah Kemunculan Keberlanjutan

Semangat keberlanjutan muncul sebagai hasil langsung dari kesadaran masyarakat terhadap tantangan dan dampak negatif yang dihadapi oleh lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini menjadi pemicu untuk mengubah perilaku, kebijakan, dan praktik menuju model pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.

Sejarah pembangunan berkelanjutan diawali dari Conference on the Human Environment (Konferensi mengenai lingkungan manusia) yang

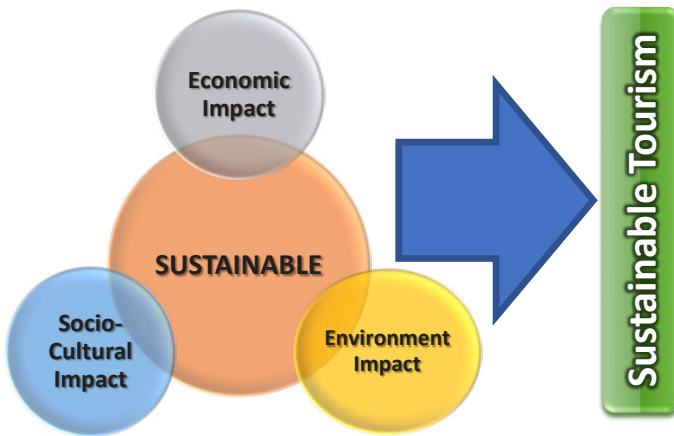
diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1972 di Stockholm. Dalam konferensi yang dihadiri oleh delegasi negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa perlu adanya pertimbangan masalah lingkungan dalam program-program pembangunan yang selama ini dijalankan.

Berangkat dari konferensi di Stockholm, PBB melalui World Conference on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 memublikasikan sebuah laporan yang berjudul *Our Common Future* atau Brundtland Report. *Our Common Future*, juga disebut *Laporan Brundtland*, adalah laporan WCED di PBB yang diterbitkan pada tahun 1987. Laporan ini dikenal karena untuk pertama kalinya istilah pembangunan berkelanjutan dan juga mendefinisikannya sebagai ”memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Semenjak laporan ini diterbitkan, penggunaan istilah “pembangunan berkelanjutan” telah menyebar di seluruh dunia. Menurut laporan tersebut, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai proses pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pada masa sekarang dengan tidak mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhinya.

Sejak dipublikasikan oleh WCED, mulai banyak para ahli dari berbagai disiplin ilmu mendefinisikan pembangunan berkelanjutan. Tidak berhenti sampai di pertemuan WCED, pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan dilanjutkan dengan United Nations’ Earth Summit atau Konferensi Bumi PBB pada tahun 1992 di Rio de Janeiro yang menghasilkan Agenda 21 dan disambung dengan pertemuan di Johannesburg yang dilaksanakan Majelis Umum PBB yang mengadopsi Millenium Development Goals pada tahun 2000 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia pada tahun 2002 (Todorov & Marinova, 2011).

Dari berbagai pertemuan yang diadakan menunjukkan urgensi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk pencapaian tidak hanya keberlanjutan bidang ekologi/lingkungan, akan tetapi keberlanjutan di bidang ekonomi dan sosial. Model pembangunan berkelanjutan sesuai yang disampaikan oleh International

Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN (Todorov & Marinova, 2011) seperti tersaji dalam Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Keberlanjutan dan Pariwisata

Model pembangunan berkelanjutan seperti pada **Gambar 1** menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan social, dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lain terpengaruh. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*).

C. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan sangat penting karena mereka merupakan pemangku kepentingan utama yang terlibat

dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai kebijakan dan program pembangunan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, peran masyarakat mencakup berbagai aspek yang meliputi partisipasi, kesadaran, keterlibatan, dan tanggung jawab dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan secara lengkap.

1. *Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.* Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini mencakup partisipasi dalam perencanaan pembangunan lokal, pengelolaan sumber daya alam, dan penetapan kebijakan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, keputusan yang diambil cenderung lebih memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi lokal sehingga mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.
2. *Pendidikan dan Kesadaran.* Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan informasi tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pentingnya pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mempromosikan keadilan sosial. Kesadaran akan masalah-masalah lingkungan dan sosial yang dihadapi membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. *Pengembangan Kapasitas.* Masyarakat perlu diberdayakan melalui pengembangan kapasitas, pelatihan, dan pembangunan keterampilan untuk terlibat dalam praktik-praktik yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini termasuk pelatihan dalam teknik pertanian berkelanjutan, manajemen sumber daya alam, dan promosi usaha-usaha ekonomi lokal yang ramah lingkungan.
4. *Pengelolaan Sumber Daya.* Masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan seperti hutan, air, tanah, dan energi. Mereka dapat berkontribusi dalam pelestarian hutan dengan partisipasi dalam program penanaman

pohon, pengelolaan daerah tangkapan air, dan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Selain itu, penghematan energi dan penggunaan sumber energi terbarukan juga merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan.

5. *Promosi Keadilan Sosial*. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Hal ini termasuk memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan, melindungi hak-hak masyarakat adat, dan mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial.
6. *Pengawasan dan Evaluasi*. Masyarakat memiliki peran dalam memantau implementasi kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan serta memberikan umpan balik kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pengawasan dan evaluasi yang efektif, masyarakat dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan.
7. *Kemitraan dan Kolaborasi*. Masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama dalam kemitraan dan kolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan yang kuat antara semua pemangku kepentingan dapat memperkuat upaya bersama dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi.

Dengan memahami dan mengadopsi peran yang efektif dalam pembangunan berkelanjutan, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Urgensi Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan (*sustainability*) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mempromosikan

pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kesadaran masyarakat terkait keberlanjutan sangat penting.

1. *Pemahaman terhadap Masalah Lingkungan.* Kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan, seperti perubahan iklim, kerusakan habitat, dan kehilangan biodiversitas, membantu mereka memahami urgensi tindakan untuk melindungi lingkungan. Semakin tinggi kesadaran ini, semakin besar kemungkinan masyarakat untuk mengambil tindakan konkret dalam mendukung praktik-praktik yang ramah lingkungan.
2. *Pengurangan Konsumsi Berlebihan.* Kesadaran tentang keberlanjutan membantu masyarakat untuk mempertimbangkan dampak dari pola konsumsi mereka terhadap lingkungan. Dengan menyadari pentingnya mengurangi konsumsi berlebihan dan memilih produk-produk yang lebih ramah lingkungan, masyarakat dapat membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.
3. *Perubahan Perilaku.* Kesadaran tentang keberlanjutan juga mendorong perubahan perilaku menuju praktik-praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup penggunaan transportasi publik, pengurangan limbah plastik, penghematan energi, dan partisipasi dalam program daur ulang. Perubahan perilaku individu dan kolektif ini penting untuk menciptakan budaya yang lebih berkelanjutan.
4. *Peningkatan Kesadaran Politik.* Masyarakat yang sadar akan keberlanjutan cenderung lebih memperhatikan isu-isu lingkungan dalam proses politik. Mereka dapat memilih pemimpin yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan mendukung kebijakan-kebijakan yang mempromosikan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
5. *Pemberdayaan Masyarakat.* Kesadaran tentang keberlanjutan memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Masyarakat yang sadar akan keberlanjutan merasa memiliki tanggung jawab untuk

memperjuangkan perlindungan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

6. *Peningkatan Inovasi dan Pengembangan Teknologi.* Kesadaran tentang keberlanjutan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dengan meningkatkan permintaan akan produk dan layanan yang berkelanjutan, masyarakat memberikan insentif bagi perusahaan dan peneliti untuk mengembangkan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
7. *Pengaruh terhadap Industri dan Bisnis.* Masyarakat yang sadar akan keberlanjutan memiliki pengaruh yang besar terhadap praktik bisnis dan industri. Mereka dapat menggunakan kekuatan pembelian mereka untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang berkomitmen kepada praktik-praktik yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, kesadaran masyarakat terkait keberlanjutan merupakan fondasi penting bagi transformasi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Melalui pendidikan, informasi, dan partisipasi aktif, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlangsungan lingkungan alam.

Kesadaran Masyarakat pada Kebijakan Terkait Keberlanjutan

Kesadaran masyarakat tentang kebijakan terkait keberlanjutan merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah atau lembaga lainnya dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang kesadaran masyarakat terkait kebijakan keberlanjutan.

1. *Pemahaman tentang Isu-Isu Lingkungan.* Kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan yang dihadapi planet ini, seperti perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan polusi, memengaruhi dukungan mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Semakin tinggi pemahaman

- masyarakat tentang urgensi dan dampak dari isu-isu lingkungan, semakin besar kemungkinan mereka mendukung kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan lingkungan.
2. *Partisipasi dalam Proses Pembuatan Kebijakan.* Kesadaran masyarakat juga memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan terkait keberlanjutan. Masyarakat yang sadar akan keberlanjutan cenderung lebih aktif dalam memberikan masukan, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam konsultasi publik terkait pembuatan kebijakan. Partisipasi ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih baik.
 3. *Tekanan dan Advokasi Masyarakat.* Kesadaran masyarakat terkait keberlanjutan juga dapat menghasilkan tekanan politik dan advokasi untuk mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dalam hal perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat yang sadar akan keberlanjutan sering kali membentuk kelompok advokasi, organisasi non-pemerintah, atau gerakan sosial untuk memperjuangkan perubahan kebijakan dan menekan pemerintah atau lembaga lainnya untuk bertindak.
 4. *Penerimaan dan Kepatuhan.* Kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan juga memengaruhi tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Masyarakat yang sadar terhadap arti penting keberlanjutan lebih cenderung untuk mendukung dan mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut karena mereka memahami manfaat jangka panjang dari upaya-upaya untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.
 5. *Pendidikan dan Informasi.* Pendidikan dan informasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan. Program-program pendidikan lingkungan, kampanye informasi, dan media sosial dapat membantu menyebarkan pengetahuan tentang isu-isu lingkungan dan implikasi kebijakan yang relevan. Semakin banyak masyarakat yang teredukasi

tentang keberlanjutan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

6. *Pendorong untuk Kebijakan Berkelanjutan.* Kesadaran masyarakat menciptakan tekanan untuk mengembangkan kebijakan publik dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
7. *Masyarakat Konsumen yang Bertanggung Jawab.* Masyarakat yang sadar akan keberlanjutan dapat mengubah pola konsumsi mereka, mendukung produk dan layanan berkelanjutan, dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Melalui peningkatan kesadaran masyarakat, dapat diharapkan bahwa semangat keberlanjutan akan terus berkembang, membentuk dasar untuk perubahan positif menuju masyarakat dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terkait kebijakan keberlanjutan sangat penting dalam menciptakan lingkungan politik yang mendukung adopsi dan implementasi kebijakan-kebijakan yang progresif dan berkelanjutan. Melalui partisipasi, advokasi, dan dukungan masyarakat, kebijakan-kebijakan ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara luas.

D. Pembangunan Berkelanjutan: Memenuhi Kebutuhan Tanpa Mengorbankan Kemampuan Generasi Mendatang

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan dalam pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hal ini berarti mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan sehingga menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan manusia jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau mengorbankan kebutuhan sosial masyarakat. Gerakan berkelanjutan tersebut termasuk:

dan kepentingan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata.

5. *Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.* Hal ini berarti mendengarkan dan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan dan lingkungan mereka, serta memastikan partisipasi mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pembangunan.
6. *Mempromosikan kesetaraan dalam distribusi biaya dan manfaat pariwisata.* Memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata didistribusikan secara adil di antara masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhitungkan dan mengelola dampak negatif pariwisata secara transparan dan bertanggung jawab.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembangunan berkelanjutan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan sehingga menciptakan kondisi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia dan kelangsungan hidup planet ini dalam jangka panjang.



Gambar 3. Pariwisata sebagai Ancaman dan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang mendasarkan tindakan saat ini untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini pertama kali diakui secara resmi oleh dunia melalui World Commission on Environment and Development (WCED) atau yang dikenal juga sebagai Komisi Brundtland pada tahun 1987.

Urgensi pembangunan berkelanjutan muncul sebagai respons terhadap pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali, pemakaian sumber daya alam yang berlebihan, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam laporan World Commission on Environment and Development yang dikenal sebagai *Our Common Future*, konsep pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “*meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*”

Aspek Penting Pembangunan Berkelanjutan

1. *Dimensi Ekonomi.* Pembangunan berkelanjutan menekankan urgensi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya ekonomi secara bijak dan distribusi keuntungan yang adil.
2. *Dimensi Sosial.* Fokus pada aspek sosial mencakup pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan manusia tanpa merugikan hak dan keseimbangan generasi mendatang.
3. *Dimensi Lingkungan.* Keberlanjutan lingkungan melibatkan perlindungan ekosistem, konservasi sumber daya alam, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan melibatkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan

keputusan. Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, mempertahankan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

E. Tanggung Jawab Kolektif dalam Mengelola Pariwisata Berkelanjutan: Peran Perusahaan, Destinasi, dan Wisatawan

Pariwisata sebagai kegiatan ekonomi yang signifikan memiliki dampak yang dapat mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Hall & Weiler, 1992; Liu, 2003). Oleh karena itu, tanggung jawab kolektif perusahaan, destinasi, dan wisatawan dalam mengelola pariwisata secara berkelanjutan menjadi esensial untuk memastikan keberlanjutan sosio-ekologis sektor ini.

1. *Peran Perusahaan Pariwisata.* Perusahaan pariwisata memiliki peran krusial dalam mengelola pariwisata secara berkelanjutan. Dalam publikasi “Sustainable Tourism: A State-Of-The-Art Review” oleh Richard W. Butler (Butler, 1999) ditekankan bahwa perusahaan pariwisata perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka. Hal ini mencakup pengelolaan limbah, konservasi energi, dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
2. *Tanggung Jawab Destinasi Pariwisata.* Destinasi pariwisata memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Dalam jurnal “Sustainable Tourism Development: A Critique” oleh Zhenhua Liu (Liu, 2003), disoroti urgensi destinasi dalam merencanakan dan mengelola pertumbuhan pariwisata dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan budaya lokal.
3. *Peran Wisatawan.* Wisatawan juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan pariwisata. Melalui pemilihan destinasi yang berkelanjutan, partisipasi dalam aktivitas bertanggung jawab,

dan pemahaman terhadap budaya lokal, wisatawan dapat membantu mengurangi dampak negatif pariwisata. Dalam artikel “Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Divide” oleh Richard Sharpley (Sharpley, 2000), dibahas bahwa wisatawan dapat menjadi agen perubahan positif jika mereka terlibat secara aktif dalam praktik pariwisata berkelanjutan.

Dengan melibatkan perusahaan, destinasi, dan wisatawan dalam tanggung jawab bersama, dapat dihasilkan model pariwisata yang tidak hanya memberdayakan masyarakat setempat dan meningkatkan penghidupan, tetapi juga menjaga integritas lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang.

F. *Sustainable* dalam Kajian Kebijakan dan Hukum

Konsep pembangunan berkelanjutan, yang juga dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan memiliki akar dalam analisis dan rekomendasi yang terdokumentasi dalam dokumen *Our Common Future* yang dirilis pada tahun 1987 oleh World Commission on Environmental and Development (WCED), sebuah lembaga yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Paradigma pembangunan berwawasan lingkungan, atau yang dikenal sebagai *eco developmentalism*, menjadi pendorong utama dalam menerapkan konsep ini dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia.

Our Common Future (1987) yang juga dikenal sebagai “Rapor Brutland” menegaskan urgensi pembangunan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “*meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*” Sementara *Paradigma Eco Developmentalism* merupakan konsep yang lebih memperhatikan kesetaraan intra-generasi dalam proyek pembangunan, sambil semakin memperluas fokusnya untuk memasukkan kesetaraan ekstra-generasi.

Urgensi Konferensi tentang Lingkungan Hidup di Stockholm (1972):

1. *Deklarasi Stockholm*. Konferensi PBB di Stockholm pada tahun 1972 menghasilkan Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia. Dokumen ini terdiri dari preambule dan 26 asas, memberikan pijakan penting bagi perkembangan hukum lingkungan di tingkat nasional dan internasional.
2. *Rencana Tindak dan Rekomendasi*. Hasil konferensi melibatkan Rencana Tindak dengan 109 rekomendasi serta rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan, termasuk pembentukan Program Lingkungan Hidup PBB (UNEP) dan Badan Koordinasi Lingkungan Hidup.
3. *Pembentukan WCED (Komisi Brutland)*. Sebagai tanggapan terhadap hasil konferensi, PBB membentuk WCED atau Komisi Brutland pada tahun 1983. Komisi ini memiliki tanggung jawab untuk mereformulasi isu kritis lingkungan dan pembangunan, memperkuat kerja sama internasional, dan meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap tindakan.

Tanggung Jawab WCED (Komisi Brutland):

1. *Reexamine the critical issue*, yaitu menelaah ulang isu-isu kritis lingkungan dan pembangunan serta merumuskan proposal tindakan inovatif, konkret, dan realistis.
2. *Strengthen international cooperation*, yaitu memperkuat kerja sama internasional dalam lingkup lingkungan dan pembangunan, serta mengevaluasi dan mengusulkan bentuk kerja sama baru.
3. *Raise the level of understanding and commitment*, yaitu meningkatkan pemahaman dan komitmen untuk bertindak dari individu, organisasi sukarelawan, bisnis, institusi, dan pemerintah.

Melalui sejarah pembentukan konsep pembangunan berkelanjutan dan peran kunci WCED, hukum lingkungan di Indonesia dapat memperkuat landasan untuk kebijakan yang lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, WCED membuat publikasi tentang konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan merumuskan definisinya sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri”. Setelah itu, Konferensi Rio de Janeiro, di Brasil pada tahun 1992, menghasilkan konsensus tentang hal-hal berikut (Hunter, Salman, et al., 1998):

1. Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan;
2. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (*The Biodiversity Convention*);
3. Konvensi tentang Perubahan Iklim (*The Climatic Change Convention*);
4. Agenda 21, sebuah dokumen 800 halaman yang berisi “cetak biru” pembangunan berkelanjutan abad 21;
5. Prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat;
6. Pengembangan lebih lanjut instrumen-instrumen hukum dari konvensi tentang disertifikasi, konvensi pencemaran laut yang bersumber dari daratan; serta
7. Perjanjian untuk membentuk komisi pembangunan berkelanjutan yang tugasnya memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio dan Agenda 21.

Ada banyak kerja sama antarnegara anggota ASEAN untuk mendorong perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Di antaranya adalah “Perjanjian Tiga Pihak” dan “Deklarasi Manila”. Perjanjian Tiga Pihak adalah perjanjian antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura tentang cara mencegah dan menghentikan pencemaran laut di Selat Malaka dan Selat Singapura. Materi dari perjanjian ini disusun dalam “Perjanjian Lalu Lintas Indonesia, Malaysia-Singapura (IMS), Peraturan dan Saran” yang membahas bagaimana mengatur lalu lintas laut di kedua selat tersebut (Danusaputro, 1981). Meskipun demikian, tujuan dan pedoman kebijakan penting, yaitu Tujuan dan Pedoman Kebijakan, dihasilkan dari Deklarasi Manila. Tujuannya

adalah untuk mengendalikan pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak, yang kemudian menjadi *dasar ASEAN Contingency Plan* pada tahun 1976. Tujuannya adalah untuk menciptakan tindakan yang tepat untuk mengendalikan pencemaran laut. Kemudian terbentuk jaringan kontak antara instansi berwenang di setiap negara ASEAN. Selain itu, mereka juga membuat Rencana Aksi, dengan tujuan utama untuk meningkatkan dan melindungi lingkungan laut, pantai, dan pesisir untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan kesejahteraan generasi saat ini dan masa mendatang. Rencana tindak ini terdiri dari analisis lingkungan (asesmen lingkungan), pengelolaan lingkungan (manajemen lingkungan), dan langkah-langkah koordinasi (Danusaputro, 1983).

Pembangunan hijau, yang kemudian dimasukkan ke dalam kebijakan hukum lingkungan Indonesia, didefinisikan sebagai upaya sadar dan berencana untuk menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, menurut Prinsip 1 dan 3 Deklarasi Rio, pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapainya. Dalam hal ini, prinsip yang paling penting diperhatikan adalah prinsip menuju ke depan yang tidak merugikan generasi mendatang. Meskipun pembangunan adalah komponen penting dalam meningkatkan kesejahteraan, prinsip menuju ke depan tetap penting. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bukan hanya kebutuhan saat ini, tetapi juga kebutuhan masa depan.

G. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia mengacu kepada upaya untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ditujukan

untuk melindungi lingkungan hidup dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek utama konsep pembangunan berkelanjutan dalam hukum lingkungan Indonesia.

1. Undang-Undang Lingkungan Hidup. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi landasan hukum bagi upaya pembangunan berkelanjutan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta integrasi pembangunan berkelanjutan dalam berbagai sektor ekonomi.
2. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Lingkungan Hidup mengakui urgensi pembangunan berkelanjutan dan menekankan perlunya mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pengambilan keputusan pembangunan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam setiap kebijakan, program, dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia.
3. Konservasi sumber daya alam. Hukum lingkungan di Indonesia mengatur upaya konservasi sumber daya alam yang merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (UU Nomor 5 Tahun 1990) menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
4. Penegakan hukum lingkungan. Salah satu aspek krusial dalam konsep pembangunan berkelanjutan adalah penegakan hukum lingkungan yang efektif. Indonesia memiliki berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Kehutanan, yang mengatur sanksi dan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
5. Partisipasi masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan lingkungan. Hukum

lingkungan di Indonesia memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemantauan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang berpotensi memengaruhi lingkungan hidup.

6. Kerja sama internasional. Pembangunan berkelanjutan juga merupakan agenda global, dan Indonesia terlibat dalam berbagai kerja sama internasional untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui kerja sama regional dan global, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan dan implementasi praktik-praktik pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan dalam hukum lingkungan Indonesia mencakup berbagai aspek yang mendukung integrasi antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memastikan bahwa kepentingan generasi saat ini dan masa depan dapat dipertahankan dan dijamin. Menurut Tunggal (2011) pembangunan berkelanjutan adalah penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan rakyat tanpa merusak lingkungan. Hal ini berarti bahwa hak atas pembangunan (*right to development*) dan hak atas lingkungan hidup yang sehat terkait erat. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Keadilan dan berkelanjutan adalah inti dari pembangunan berkelanjutan.

Namun, menurut konsep hukum positif Indonesia, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk memadukan elemen lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Untuk menyelesaikan masalah AMDAL, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup dibuat oleh Pemerintah RI. Aturan ini dibuat untuk memenuhi Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 UUPPLH dan untuk memberikan keamanan hukum untuk pelaksanaan teknis. Undang-undang Nomor

23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215), yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup sebelum UUPPLH ditetapkan.

Kebijakan nasional pertama kali menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan melalui Keppres Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara. Jauh sebelumnya, peraturan lingkungan yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Hindenburg pada tahun 1916, *Parelvisscherij, Sponssenvisscherijordonantie* (Stbl. 1916 No. 157), juga berlaku di Hindia Belanda. Aturan ini berlaku untuk bunga karang dan mutiara. Pada tahun 1920, Peraturan Gubernur Jenderal No. 86, yang merupakan peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan, dikeluarkan. *Kustvisscherijordonnantie* adalah undang-undang tambahan di bidang yang sama (Stbl 1927 No. 144). Ordonansi Hidunder (Stbl 1926 No. 226), yang diubah dan ditambahkan terakhir dengan Stbl 1940 No. 450, merupakan ordonansi lingkungan hidup yang sangat penting. *Bedrijfsregelemen-teringsordonnantie* 1934 (Stbl 1938 Nomor 80 jo. Stbl 1948 Nomor 224) juga mengeluarkan di bidang perusahaan. dan lebih banyak lagi (Hardjasoemantri, 2017).

Meskipun demikian, tidak ada aturan lingkungan khusus yang berlaku selama penjajahan Jepang di Indonesia. Pelarangan penebangan pohon aghata, alba, dan balsem saat itu ditetapkan oleh pemerintah Jepang. *Gunzeikan* memberikan izin untuk penerbangan. Hal ini berdasarkan *Osuma S. Kanrei* Nomor 6, yang berkaitan dengan larangan yang disebutkan di atas. Ketentuan ini terkait dengan kebutuhan pemerintah Jepang terhadap tiga jenis kayu yang dimaksud untuk membuat pesawat peluncur, juga dikenal sebagai *gliders*, untuk mengangkut logistik tentara (Hardjasoemantri, 2017).

H. Kesimpulan

Kesimpulan tentang sejarah keberlanjutan dalam pariwisata adalah:

1. Peran kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap tantangan lingkungan dan dampak negatifnya memicu semangat keberlanjutan. Hal ini mengarah kepada perubahan perilaku, kebijakan, dan praktik menuju pembangunan berkelanjutan.
2. Sejarah pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan dimulai dari konferensi-konferensi internasional seperti Konferensi Stockholm pada tahun 1972 dan World Conference on Environment and Development pada tahun 1987. Laporan Brundtland menjadi tonggak penting dalam merumuskan definisi dan agenda pembangunan berkelanjutan.
3. Model pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan melibatkan tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek ini saling terkait dan harus diintegrasikan untuk menciptakan kondisi berkelanjutan.
4. Urgensi kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat penting dalam mengubah persepsi terhadap lingkungan, menghadapi tantangan lingkungan global, dan mendorong partisipasi dalam kebijakan berkelanjutan.
5. Dampak kesadaran masyarakat kepada kebijakan. Kesadaran masyarakat memengaruhi pengembangan kebijakan publik yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan tanggung jawab konsumen yang bertanggung jawab.
6. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam hukum. Sejarah perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan juga tercermin dalam peraturan hukum, termasuk dokumen internasional seperti Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan.
7. Tanggung jawab bersama dalam pariwisata berkelanjutan. Di sektor pariwisata, tanggung jawab kolektif diperlukan

dari perusahaan, destinasi, dan wisatawan untuk menjaga keberlanjutan sosio-ekologis.

8. Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan. Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan implementasi konsep pembangunan berkelanjutan, diharapkan dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, kesejahteraan yang merata, dan pelestarian lingkungan untuk generasi saat ini dan masa depan.

I. Pertanyaan Latihan

1. Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap tantangan lingkungan dan dampak negatifnya memengaruhi pembangunan berkelanjutan?
2. Apa yang menjadi pemicu utama munculnya kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam sejarah?
3. Bagaimana Konferensi mengenai Lingkungan Manusia di Stockholm pada tahun 1972 memengaruhi kesadaran global tentang pembangunan berkelanjutan?
4. Apa yang dihasilkan dari laporan *Our Common Future* atau Laporan Brundtland pada tahun 1987 dan bagaimana laporan ini memengaruhi pandangan dunia tentang pembangunan berkelanjutan?
5. Bagaimana Konferensi Bumi PBB di Rio de Janeiro pada tahun 1992 memperkuat kesepakatan global tentang pembangunan berkelanjutan?

Pariwisata berkelanjutan telah menjadi sebuah kebutuhan mendesak dalam upaya melindungi sumber daya alam, memperkuat budaya lokal, serta memastikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di destinasi pariwisata. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan yang kuat bagi para mahasiswa pariwisata dan siapa pun yang bergelut atau berminat untuk memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi serta solusi-solusi yang inovatif dalam mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan.

Pembahasan tentang pariwisata berkelanjutan tersaji dalam bab-bab yang disusun secara sistematis, mulai dari konsep dasar pariwisata berkelanjutan, manajemen destinasi, hingga upaya-upaya penerapan praktik-praktik terbaik dalam berbagai konteks global dan lokal. Dengan kata lain, buku ini merupakan sebuah panduan yang komprehensif, dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, prinsip, dan praktik-praktik terbaik dalam pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami kompleksitas pariwisata berkelanjutan dan memberikan inspirasi untuk bertindak dalam mendukung pengembangan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan untuk saat ini, melainkan juga untuk generasi mendatang. Semoga informasi yang disajikan dalam buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi industri pariwisata dan dunia kita yang berkelanjutan.



(Anggota IKAPI No. 146/DIY/2021)

Email: matakatainspirasi@gmail.com

ISBN: 978-623-8435-53-7



9 786238 435537